



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) - 22791400  
FAX : (021) - 22791452  
(021) - 22791448

email : [bptj@dephub.go.id](mailto:bptj@dephub.go.id)  
home page : <http://bptj.dephub.go.id>

Jakarta, 5 Mei 2023

Nomor : KU.204/1/10/BPTJ/2023

Klasifikasi : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun  
2022 pada Badan Pengelola Transportasi  
Jabodetabek (*Audited*)

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan BPTJ Tahun 2022 (*Audited*) tanggal 28 April 2023, disampaikan bahwa telah dilakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan BPK-RI dan Biro Keuangan Setjen Kemenhub dan telah disepakati Angka Asersi Final Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2022 (*Audited*).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (*Audited*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si  
NIP. 19790629 199802 1 002

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenhub;
2. Kepala Biro LPP BMN Setjen Kemenhub.

# 2022 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)



**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

 (021) 22791400  [bptj.dephub.go.id](http://bptj.dephub.go.id)  Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

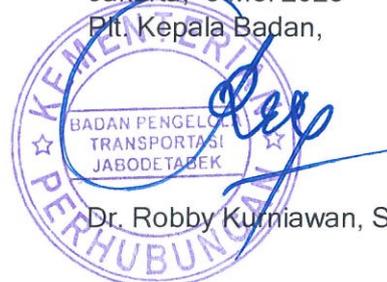
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah salah satu entitas pelaporan dibawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023

Plt. Kepala Badan,



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | 2  |
| DAFTAR ISI .....  | 3  |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....                             | 4  |
| RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....                            | 5  |
| I. LRA.....   | 7  |
| II. NERACA.....   | 8  |
| III. LAPORAN OPERASIONAL .....                              | 9  |
| IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....                         | 10 |
| V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....                      | 11 |
| A. Penjelasan Umum .....                                    | 11 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ..... | 20 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....                      | 28 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....        | 43 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....  | 50 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya.....                        | 52 |
| VI. LAMPIRAN  |    |

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan tanggung jawab UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 5 Mei 2023  
Plt. Kepala Badan,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.064.393.226,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.064.393.226,00 atau mencapai 99,66% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp7.088.650.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp244.083.955.069,00 atau mencapai 99,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp244.143.143.000,00.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp620.023.567.473,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp17.289.959.730,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp465.212.576.830,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp137.521.030.913,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp41.029.000,00 dan Rp619.982.538.473,00.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.462.000.550,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp223.093.366.158,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(219.631.365.608,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.531.509.676,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(216.114.293.432,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp599.695.945.509,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(216.114.293.432,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(711.280.447,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp237.112.166.843,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp619.982.538.473,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

## I. LRA

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

| URAIAN                           | CATATAN | 31/12/2022             |                        | % thd<br>Angg | 31/12/2021             |
|----------------------------------|---------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                  |         | ANGGARAN               | REALISASI              |               | REALISASI              |
| <b>PENDAPATAN</b>                |         |                        |                        |               |                        |
| Penerimaan Negara Bukar Pajak    | B.1     | 7,088,650,000          | 7,064,393,226          | 99.66         | 4,509,311,770          |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>         |         | <b>7,088,650,000</b>   | <b>7,064,393,226</b>   | <b>99.66</b>  | <b>4,509,311,770</b>   |
| <b>BELANJA</b>                   |         |                        |                        |               |                        |
| <b>Belanja Operasi</b>           | B.2.    |                        |                        |               |                        |
| Belanja Pegawai                  | B.3     | 27,101,458,000         | 27,105,528,514         | 100.02        | 23,122,286,036         |
| Belanja Barang                   | B.4     | 152,088,523,000        | 152,025,916,962        | 99.96         | 103,322,091,271        |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>    |         | <b>179,189,981,000</b> | <b>179,131,445,476</b> | <b>99.97</b>  | <b>126,444,377,307</b> |
| <b>Belanja Modal</b>             | B.5     |                        |                        |               |                        |
| Belanja Tanah                    | B.5.1   |                        |                        |               |                        |
| Belanja Peralatan dan Mesin      | B.5.2   | 44,888,121,000         | 44,887,558,093         | 100.00        | 75,177,087,340         |
| Belanja Gedung dan Bangunan      | B.5.3   | 14,478,848,000         | 14,478,844,000         | 100.00        | 40,052,950,100         |
| Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan | B.5.4   |                        |                        |               |                        |
| Belanja Modal Lainnya            | B.5.5   | 5,586,193,000          | 5,586,107,500          | 100.00        | 49,426,891,450         |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>      |         | <b>64,953,162,000</b>  | <b>64,952,509,593</b>  | <b>100.00</b> | <b>164,656,928,890</b> |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>            |         | <b>244,143,143,000</b> | <b>244,083,955,069</b> | <b>99.98</b>  | <b>291,101,306,197</b> |

Jakarta, 5 Mei 2023

Plt. Kepala Badan,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si

## II. NERACA

### BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

| URAIAN   | CATATAN | 31/12/2022             | 31/12/2021             |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>  |         |                        |                        |
| <b>ASET LANCAR</b>                                       |         |                        |                        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                             | C.1     | -                      | -                      |
| Kas di Bendahara Penerimaan                              | C.2     | -                      | -                      |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                               | C.3     | -                      | -                      |
| Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)                        | C.4     | 1.390.977.591          | -                      |
| Uang Muka Belanja (Prepayment)                           | C.5     | -                      | -                      |
| Piutang Bukan Pajak                                      | C.6     | -                      | -                      |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek  | C.7     | -                      | -                      |
| Bagian Lancar TP/TGR                                     | C.8     | -                      | -                      |
| Persediaan   | C.9     | 15.898.982.139         | 3.525.550.255          |
| Persediaan Belum Diregister                              |         | -                      | -                      |
| Jumlah Aset Lancar                                       |         | 17.289.959.730         | 3.525.550.255          |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                            |         |                        |                        |
| Tagihan TP/TGR   | C.10    | -                      | -                      |
| Tagihan Penjualan Angsuran                               | C.11    | -                      | -                      |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | C.12    | -                      | -                      |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang                            |         | -                      | -                      |
| <b>ASET TETAP</b>  |         |                        |                        |
| Tanah  | C.13    | 152.859.956.635        | 152.859.956.635        |
| Peralatan dan Mesin                                      | C.14    | 315.656.812.690        | 270.591.771.847        |
| Gedung dan Bangunan                                      | C.15    | 203.296.389.836        | 189.506.674.143        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                              | C.16    | 27.437.061.023         | 27.437.061.023         |
| Aset Tetap Lainnya                                       | C.17    | 47.148.750             | 47.148.750             |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                              | C.18    | -                      | -                      |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                          | C.19    | 234.084.792.104        | 177.803.568.606        |
| Jumlah Aset Tetap  |         | 465.212.576.830        | 462.639.043.792        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                      |         |                        |                        |
| Aset Tak Berwujud  | C.21    | 143.037.406.000        | 137.884.362.500        |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan                       | C.22    | -                      | -                      |
| Aset Lair-Lain   | C.23    | 350.053.000            | 213.103.000            |
| Aset Lainnya Belum Diregister                            | C.24    | -                      | -                      |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya         | C.25    | 5.866.428.087          | 4.566.114.038          |
| Jumlah Aset Lainnya                                      |         | 137.521.030.913        | 133.531.351.462        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                       |         | <b>620.023.567.473</b> | <b>599.695.945.509</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>   |         |                        |                        |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                           |         |                        |                        |
| Uang Muka dari KPPN                                      | C.24    | -                      | -                      |
| Utang kepada Pihak Ketiga                                | C.25    | -                      | -                      |
| Pendapatan Diterima Dimuka                               | C.26    | 41.029.000             | -                      |
| Hibah Langsung yang Belum Disahkan                       | C.27    | -                      | -                      |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                           |         | 41.029.000             | -                      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                  |         | <b>41.029.000</b>      | <b>-</b>               |
| <b>EKUITAS</b>   |         |                        |                        |
| Ekuitas  | C.28    | 619.982.538.473        | 599.695.945.509        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                    |         | <b>619.982.538.473</b> | <b>599.695.945.509</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                      |         | <b>620.023.567.473</b> | <b>599.695.945.509</b> |

Jakarta, 5 Mei 2023

Plt. Kepala Badan,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

| URAIAN   | CATATAN | 31-Dec-22                | 31-Dec-21                |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                    |         |                          |                          |
| <b>PENDAPATAN</b>  |         |                          |                          |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                                  | D.1     | 3.462.000.550            | 3.306.244.500            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                       |         | <b>3.462.000.550</b>     | <b>3.306.244.500</b>     |
| <b>BEBAN</b>   |         |                          |                          |
| Beban Pegawai  | D.2     | 27.105.528.514           | 23.122.286.036           |
| Beban Persediaan   | D.3     | 3.656.266.222            | 3.100.220.626            |
| Beban Barang dan Jasa  | D.4     | 107.404.562.080          | 88.593.420.903           |
| Beban Pemeliharaan   | D.5     | 8.336.707.133            | 19.064.384.459           |
| Beban Perjalanan Dinas   | D.6     | 18.926.560.302           | 20.507.724.143           |
| Beban Barang urtuk Diserahkan kepada Masyarakat                | D.7     | -                        | -                        |
| Beban Bantuan Sosial   | D.8     | -                        | -                        |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                                | D.9     | 57.663.741.907           | 54.644.497.234           |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                          | D.10    | -                        | -                        |
| Beban Lain-Lain  | D.11    | -                        | -                        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>  |         | <b>223.093.366.158</b>   | <b>209.032.533.401</b>   |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>             |         | <b>- 219.631.365.608</b> | <b>- 205.726.288.901</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                                |         |                          |                          |
| Pendapatar Pelepasan Aset Non Lancar                           |         | -                        | -                        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                                |         | 14.437.500               | 16.751.440.200           |
| Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar             | D.12    | - 14.437.500             | - 16.751.440.200         |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya               |         | 3.561.363.676            | 1.203.067.270            |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                    |         | 29.854.000               | -                        |
| Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya | D.13    | <b>3.531.509.676</b>     | <b>1.203.067.270</b>     |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                |         | <b>- 216.114.293.432</b> | <b>- 221.274.661.831</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>  | D.14    | -                        | -                        |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                                      | D.15    | <b>- 216.114.293.432</b> | <b>- 221.274.661.831</b> |

Jakarta, 5 Mei 2023

Plt. Kepala Badan,



Dr. Rebby Kurniawan, S.STP., M.Si

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

| URAIAN   | CATATAN | 31-Dec-22              | 31-Dec-21              |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>  | E.1     | 599,695,945,509        | 534,164,854,395        |
| SURPLUS/DEFISIT LO   | E.2     | - 216,114,293,432      | - 221,274,661,831      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN<br>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR |         |                        |                        |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                   | E.3     |                        |                        |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                                 | E.4     | -                      | 2,310,000              |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI                     | E.5     | - 500,966,447          | - 550,031,110          |
| KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI                   | E.6     | - 210,314,000          | -                      |
| KOREKSI ATAS PENDAPATAN                                    |         | -                      | -                      |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                    | E.7     | 237,112,166,843        | 287,358,094,055        |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                                 | E.8     | 20,286,592,964         | 65,531,091,114         |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                       | E.9     | <b>619,982,538,473</b> | <b>599,695,945,509</b> |

Jakarta, 5 Mei 2023  
 Plt. Kepala Badan,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek khususnya sampai dengan tahun 2024 adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk

melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut : 1) Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran, 2) Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran, dan 3) Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan modul Aset Tetap adalah sistem yang mengolah dan menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek periode 31 Desember 2022 diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memiliki satu Satker dengan empat Pejabat Pembuat Komitmen

#### *Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badar Pengelola Transportasi Jabodetabek menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Secangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya***Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

## a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

## b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian  | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo  | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan  | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan  | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d. 40 tahun  |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berkas Akrua  
Pertama Kali*

#### **(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Estimasi anggaran/target PNBP TA 2022 dari semula sampai dengan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu Rp7.088.650.000,00.

Selama periode berjalan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak dua belas kali dari DIPA awal. Pagu belanja BPTJ setelah revisi adalah sebesar Rp244.143.143.000,00 sebagaimana berikut:

### Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022

| Uraian                        | ANGGARAN 2022          |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | AWAL                   | SETELAH REVISI         |
| <b>Pendapatan</b>             |                        |                        |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 7.088.650.000          | 7.088.650.000          |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      | <b>7.088.650.000</b>   | <b>7.088.650.000</b>   |
| <b>Belanja</b>                |                        |                        |
| Belanja Pegawai               | 25.913.097.000         | 27.101.458.000         |
| Belanja Barang                | 183.886.379.000        | 152.088.523.000        |
| Belanja Modal                 | 75.030.856.000         | 64.953.162.000         |
| Belanja Bantuan Sosial        | -                      | -                      |
| <b>Jumlah Belanja</b>         | <b>284.830.332.000</b> | <b>244.143.143.000</b> |

Realisasi  
Pendapatan  
Rp7.064.393.226,00

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.064.393.226,00 atau mencapai 99,66% dari estimasi pencapaian yang ditetapkan sebesar Rp7.088.650.000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian                        | 2022                 |                      | %             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                               | Anggaran             | Realisasi            |               |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 7.088.650.000        | 7.064.393.226        | 99,66%        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>7.088.650.000</b> | <b>7.064.393.226</b> | <b>99,66%</b> |

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 56,66 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021*

| Uraian                        | 2022                 | 2021                 | %            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 7.064.393.226        | 4.509.311.770        | 56,66        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>7.064.393.226</b> | <b>4.509.311.770</b> | <b>56,66</b> |

*Realisasi  
Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
Rp7.064.393.226,00*

**B.1.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.064.393.226,00 dan Rp4.509.311.770,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 56,66% dari TA 2021, hal ini disebabkan meningkatnya secara signifikan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas temuan LK TA 2021.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut

*Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN  | 2022                 | 2021                 | NAIK (TURUN)         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya                        | 3,461,000,000        | 3,305,700,000        | 155,300,000          |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah          |                      |                      | -                    |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 24,524,669           | 2,408,808            | 22,115,861           |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  | 2,814,716,701        | 523,077,162          | 2,291,639,539        |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu   | 722,122,306          | 632,581,300          | 89,541,006           |
| Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu |                      | 45,000,000           | (45,000,000)         |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                 | 41,474,500           | 544,500              | 40,930,000           |
| Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji                  | -                    | -                    | -                    |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                               | 555,050              |                      |                      |
| <b>Jumlah</b>   | <b>7,064,393,226</b> | <b>4,509,311,770</b> | <b>2,555,081,456</b> |

Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya senilai Rp3.461.000.000,00 berasal dari PNBPFungsional yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek beserta Penerbitan Kartu Pengawasan serta Jasa Rekomendasi Andalalin di Wilayah Jabodetabek.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp24.524.669,00 merupakan pembulatan pengembalian gaji senilai Rp3.843,00 dan pengembalian gaji senilai Rp24.520.826,00 yang pemotongan gaji pegawai melalui SPM perbulan akibat kesalahan pembayaran tunjangan struktural a.n. Hananto Prakoso, yang seharusnya sudah tidak dibayarkan karena yang bersangkutan sudah alih status menjadi atase perhubungan.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp2.814.716.701,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja barang TA 2021, dengan rincian penerimaan terlampir.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp722.122.306,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja modal TA 2021, dengan rincian penerimaan terlampir.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp41.474.500,00 berasal dari pendapatan sewa rumah dinas atas aset rumah dinas Ditjen Perhubungan Udara dengan skema pembayaran dilakukan pemotongan secara otomatis pada SPM Gaji Pensiun pegawai. Pendapatar tersebut seharusnya masuk ke Satker Ditjen Perhubungan Udara tetapi karena yang bersangkutan pensiun di BPTJ sehingga pemotongan SPM atas sewa masuk sebagai PNBK pada Satker BPTJ, selain itu pendapatan berasal dari Perpanjangan Sewa Menyewa PT. Epid Menara Assetco berupa sewa Tanah pada Terminal Jatijajar untuk penempatan tower BTS senilai Rp41.029.000,00.

Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp555.050,00 berasal dari potongan usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang diusulkan melewati tahun Terhitung Mulai Tangga (TMT) berlakunya SK Kenaikan Pangkat Pegawai.

*Realisasi Belanja*  
*Rp244.083.955.069,*  
*00*

## B.2. BELANJA

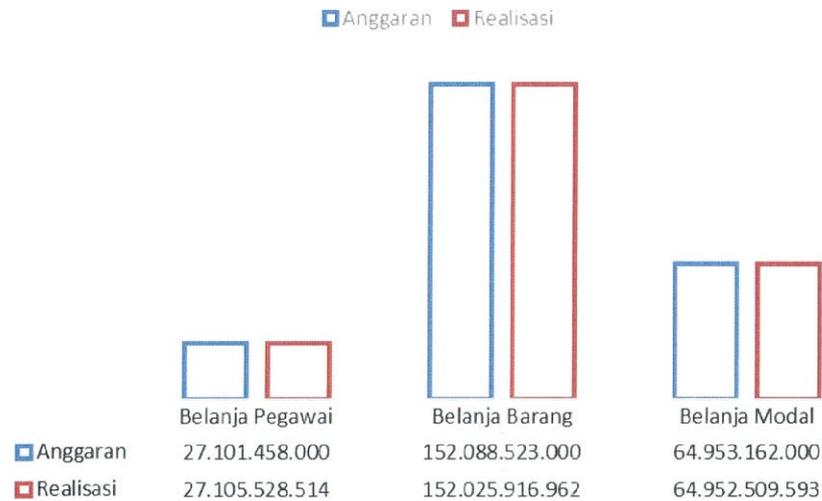
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp244.083.955.069,00 atau 99,98% dari anggaran belanja sebesar Rp244.143.143.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2022 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja*

| URAIAN                 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 |                        |              |
|------------------------|--|------------------------|--------------|
|                        | Anggaran                                       | Realisasi              | % thdp Angg. |
| Be anja Pegawai        | 27,101,458,000                                 | 27,105,528,514         | 100.02       |
| Be anja Barang         | 152,088,523,000                                | 152,025,916,962        | 99.96        |
| Be anja Modal          | 64,953,162,000                                 | 64,952,509,593         | 100.00       |
| Be anja Bantuan Sosial | -  | -                      | -            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>244,143,143,000</b>                         | <b>244,083,955,069</b> | <b>99.98</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022*



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 16,15% di banding 31 Desember 2021. Perbandingan realisasi belanja sebagaimana berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                 | Rincian Realisasi Belanja |                        |                |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
|                        | 2022                      | 2021                   | % naik/(turun) |
| Belanja Pegawai        | 27.105.528.514            | 23.122.286.036         | 17,23          |
| Belanja Barang         | 152.025.916.962           | 103.322.091.271        | 47,14          |
| Belanja Modal          | 64.952.509.593            | 164.656.928.890        | (60,55)        |
| Belanja Bantuan Sosial | -                         | -                      | -              |
| <b>Jumlah</b>          | <b>244.083.955.069</b>    | <b>291.101.306.197</b> | <b>(16,15)</b> |

Pada TA 2022, BPTJ menganggarkan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.502.373.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.502.187.105,00 atau 99,99%. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk penanganan COVID-19 untuk anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19*

| AKUN   | URAIAN   | ANGGARAN      | REALISASI     | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1      | 2  | 3             | 4             | 5=4/3                | 6             |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1.239.426.000 | 1.239.297.379 | 99,99                | 128.621       |
| 521841 | Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19      | 917.137.000   | 917.112.226   | 100,00               | 24.774        |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19                   | 345.810.000   | 345.777.500   | 99,99                | 32.500        |
| JUMLAH |  | 2.502.373.000 | 2.502.187.105 | 99,99                | 185.895       |

*Realisasi Belanja Pegawai*  
Rp27.105.528.514,00

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.105.528.514,00 dan Rp23.122.286.036,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai digunakan untuk memberikan gaji bulanan, Gaji ketiga belas, Gaji Keempat belas (tunjangan hari raya), uang lembur, uang makan dan tunjangan kinerja bulanan kepada 238 pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,23% dari TA 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                                       | REALISASI 2022        | REALISASI 2021        | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS                       | 9.354.163.607         | 7.871.532.820         | 18,84        |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS                  | 174.245               | 135.409               | 28,68        |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                | 555.583.262           | 521.570.490           | 6,52         |
| Belanja Tunj. Anak PNS                       | 154.215.454           | 146.396.396           | 5,34         |
| Belanja Tunj. Struktural PNS                 | 513.540.000           | 679.380.000           | - 24,41      |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS                 | 273.513.000           | 43.550.000            | 528,04       |
| Belanja Tunj. PPh PNS                        | 34.884.823            | 34.190.311            | 2,03         |
| Belanja Tunj. Beras PNS                      | 520.989.480           | 476.161.500           | 9,41         |
| Belanja Uang Makan PNS                       | 1.360.479.000         | 1.222.859.000         | 11,25        |
| Belanja Tunjangan Umum PNS                   | 442.835.000           | 356.610.000           | 24,18        |
| Belanja Uang Lembur                          | 115.630.000           | 403.475.000           | - 71,34      |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 13.796.690.505        | 11.405.020.713        | 20,97        |
| <b>Jumlah Belanja kotor</b>                  | <b>27.122.698.376</b> | <b>23.160.881.639</b> | <b>17,11</b> |
| Pengembalian Belanja Pegawai                 | 17.169.862            | 38.595.603            | - 56         |
| <b>Jumlah Belanja</b>                        | <b>27.105.528.514</b> | <b>23.122.286.036</b> | <b>17,23</b> |

*Realisasi Belanja  
Barang  
Rp152.025.916.962,00*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp152.025.916.962,00 dan Rp103.322.091.271,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 47,14% dari Realisasi TA 2021. Realisasi yang signifikan berasal dari 1) Belanja Barang Non Operasional, hal ini dikarenakan adanya realisasi dari kegiatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek dengan Skema Buy The Service (BTS) Tahun 2022 dan 2) Belanja Jasa, hal ini dikarenakan adanya realisasi Belanja Jasa Konsultan untuk beberapa studi.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN  | REALISASI<br>2022      | REALISASI<br>2021      | %       |
|---|------------------------|------------------------|---------|
| Belanja Barang Operasional                              | 19.148.892.798         | 19.376.336.658         | - 1,17  |
| Belanja Barang Non Operasional                          | 132.877.025.637.670    | 31.146.800.433         | 105,42  |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi               | 4.129.136.613          | 5.171.935.041          | - 20,16 |
| Belanja Jasa  | 24.219.864.362         | 8.245.365.954          | 193,74  |
| Belanja Pemeliharaan                                    | 7.363.099.317          | 18.873.929.042         | - 60,99 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri                         | 18.777.044.978         | 20.548.992.688         | - 8,62  |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri                          | 165.458.296            | -                      | -       |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda | 14.257.525.900         | -                      | -       |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                             | <b>152.041.859.934</b> | <b>103.363.359.816</b> | 47,09   |
| Pengembalian Belanja                                    | 15.942.972             | 41.268.545             | - 61,37 |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                   | <b>152.025.916.962</b> | <b>103.322.091.271</b> | 47,14   |

*Realisasi Belanja  
Modal  
Rp64.952.509.593,00*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp64.952.509.593,00 dan Rp164.656.928.890,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 60,55% dibandingkan TA 2021. Penurunan realisasi belanja modal dikarenakan pada tahun 2022 adanya 1) pergeseran beberapa akun belanja seperti fasilitas keselamatan jalan berupa marka yang dianggarkan dengan MAK 52 (belanja barang), jasa konsultan untuk studi yang dianggarkan dengan MAK 52 (belanja barang), 2) Selesainya kegiatan Pembangunan Prasarana Penunjang Kegiatan Pemberian Subsidi Angkutan Umum dengan skema Buy The Service di Wilayah Jabodetabek yang dilanjutkan dengan Penyediaan Layanan

Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek dengan Skema Buy The Service (BTS) Tahun 2022 dengan menggunakan MAK 52 (belanja barang).

*Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                                    | REALISASI T.A. 2022   | REALISASI T.A. 2021    | Naik/turun              | %              |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah                       | -                     | -                      | -                       | -              |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 44.887.558.093        | 75.177.087.340         | (30.289.529.247)        | - 40,29        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 14.478.844.000        | 40.052.950.100         | (25.574.106.100)        | - 63,85        |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                     | -                      | -                       | -              |
| Belanja Modal Lainnya                     | 5.586.107.500         | 49.426.891.450         | (43.840.783.950)        | - 88,70        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | <b>64.952.509.593</b> | <b>164.656.928.890</b> | <b>- 99.704.419.297</b> | <b>- 60,55</b> |
| Pengembalian Belanja                      | -                     | -                      | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>64.952.509.593</b> | <b>164.656.928.890</b> | <b>- 99.704.419.297</b> | <b>- 60,55</b> |

*Realisasi Belanja  
Modal Tanah Rp0*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal tanah selama periode 31 Desember 2022 dibandingkan periode sebelumnya.

*Realisasi Belanja  
Modal Peralatan dan  
Mesin  
Rp44.887.558.093,00*

**B. 5. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp44.887.558.093,00 dan Rp75.177.087.340,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 40,29% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA              | REALISASI T.A. 2022   | REALISASI T.A. 2021   | Naik/turun              | %              |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 44.887.558.093        | 75.177.087.340        | (30.289.529.247)        | (40,29)        |
|                                   | -                     | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>44.887.558.093</b> | <b>75.177.087.340</b> | <b>(30.289.529.247)</b> | <b>(40,29)</b> |
| Pengembalian                      | -                     | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>44.887.558.093</b> | <b>75.177.087.340</b> | <b>(30.289.529.247)</b> | <b>(40,29)</b> |

*Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp14.478.844.000,00*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.478.844.000,00 dan Rp40.052.950.100,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 63,85% dibandingkan Realisasi TA 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA              | REALISASI T. A.2021   | REALISASI T. A.2020   | Naik/turun              | %              |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 14.478.844.000        | 40.052.950.100        | (25.574.106.100)        | - 63,85        |
|                                   | -                     | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>14.478.844.000</b> | <b>40.052.950.100</b> | <b>(25.574.106.100)</b> | <b>(63,85)</b> |
| Pengembalian                      | -                     | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>14.478.844.000</b> | <b>40.052.950.100</b> | <b>(25.574.106.100)</b> | <b>(63,85)</b> |

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA        | REALISASI T. A.2022 | REALISASI T. A. 2021 | Naik/turun | %        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|
| Belanja Modal Jaringan      | -                   | -                    | -          | -        |
|                             | -                   | -                    | -          | -        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b> |
| Pengembalian                | -                   | -                    | -          | -        |
| <b>Jumlah Belanja</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b> |

*Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp5.586.107.500,00*

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.586.107.500,00 dan Rp7.455.106.880,00 mengalami penurunan sebesar 88,70% dibandingkan Realisasi TA 2021.

#### *Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA        | REALISASI T. A.2022  | REALISASI T. A. 2021  | Naik/turun              | %              |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Modal Lainnya       | 3.602.385.700        | 24.604.793.371        | (21.002.407.671)        | - 85,36        |
|                             | -                    | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b> | <b>3.602.385.700</b> | <b>24.604.793.371</b> | <b>(21.002.407.671)</b> | <b>- 85,36</b> |
| Pengembalian                | -                    | -                     | -                       | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>       | <b>3.602.385.700</b> | <b>24.604.793.371</b> | <b>(21.002.407.671)</b> | <b>- 85,36</b> |

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00*

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

| Keterangan                         | 2022     | 2021     |
|------------------------------------|----------|----------|
| Saldo Uang Persediaan (UP)         | -        | -        |
| Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan | -        | -        |
|                                    | -        | -        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0,00*

#### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak dibayarkan langsung oleh pengguna jasa dengan mekanisme pembayaran melalui Aplikasi SIMPONI PNBP yang langsung terhubung dengan Bank yang ditunjuk dalam e-billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan. Sehingga Bendahara Penerimaan tidak mengelola kas tetapi hanya merekap pembayaran dari SIMPONI PNBP untuk selanjutnya dibuat laporan Realisasi Penerimaan PNBP.

*Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp0,00*

#### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran

yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Belanja Dibayar di Muka  
(Prepaid)  
Rp1.390.977.591,00*

#### **C.4. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)**

Saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.390.977.591,00 dan Rp,00. Beban Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) sebesar Rp1.390.977.591,00 merupakan pembayaran terhadap kegiatan dengan tanggal berakhir kontrak pada 31 Desember 2022 yaitu dan “Pembangunan Fasilitas Integrasi (Skybridge) Stasiun Bojonggede ke Terminal Bojonggede”. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 batas akhir pengajuan SPM adalah pada tanggal 23 Desember 2022 sehingga untuk pembayaran kegiatan tersebut diperlukan penerbitan bank garansi. Per 31 Desember 2022, progres penyelesaian pembangunan fisik pekerjaan tersebut belum 100%, namun baru mencapai 95,289%, sehingga terhadap jaminan bank garansi yang telah diterbitkan belum dapat diklaim.

Pekerjaan “Pembangunan Fasilitas Integrasi (Skybridge) Stasiun Bojonggede ke Terminal Bojonggede” merupakan bagian kontrak dari belanja Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nomor kontrak BA.P.01/KTR-12.PRAS/IV/2022 Setelah pekerjaan fisik selesai 100% dan bank garansi diklaim, nilai dari sisa kontrak senilai Rp1.390.977.591,00 akan dicatat sebagai bagian dari persediaan.

*Uang Muka Belanja  
(Prepayment) Rp0,00*

#### **C.5. Uang Muka Belanja (*Prepayment*)**

Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan untuk kepentingan dinas.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp0,00*

### C.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih -Piutang Jangka  
Pendek Rp0,00.*

### C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada kualitas piutang lancar yaitu nilai piutang dikalikan dengan 0,5 persen.

*Bagian Lancar Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp0,00*

### C.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Persediaan  
Rp15.898.982.139,00*

### C.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp15.898.982.139,00 dan Rp3.525.550.255,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Jenis   | NILAI T.A.2022        | NILAI T.A. 2021      |
|---|-----------------------|----------------------|
| Barang Konsumsi   | 2.964.305.330         | 3.376.828.715        |
| Bahan untuk Pemeliharaan                                      | 68.128.500            | 475.640              |
| Suku Cadang   | -                     | 148.245.900          |
| Pita Cukai, Materai dan Leges                                 | -                     | -                    |
| Bahan Baku  | -                     | -                    |
| Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 12.866.548.309        |                      |
| <b>Jumlah</b>   | <b>15.898.982.139</b> | <b>3.525.550.255</b> |

Barang konsumsi dengan jenis kartu elektronik sejumlah 51.515 unit pada TA 2021 sudah dikeluarkan dari gudang, namun ditemukan bahwa pada per 31 Desember 2021 kartu elektronik tersebut belum terpakai dipengguna/petugas perizinan sehingga perlu dikembalikan ke gudang. Terhadap kartu elektronik tersebut per 31 Desember 2021 belum dilakukan koreksi pencatatan keluar/pemakaian, sehingga dilakukan koreksi berupa penambahan sejumlah 51.515 unit dengan nilai Rp776.331.050,00 dengan metode stock opname yang dilakukan pada 30 Juni 2022.

Terdapat Transfer Masuk Persediaan berupa Blanko Tilang Pengadaan TA 2017 sebanyak 25 box (12.500 set) dengan total nilai Rp37.475.000,00 dari Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) yang diserahkan terimakan kepada BPTJ pada tanggal 1 Juli 2022.

Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat merupakan pembangunan fasilitas integrasi (skybridge) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede nomor kontrak BA.P.01/KTR-12.PRAS/IV/2022 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp13.666.512.000,00 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dicatat sebagai bagian dari persediaan. Namun berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* fisik di lapangan terhadap pekerjaan dimaksud posisi 31 Desember 2023 baru tercapai sebesar 95,28% dengan presentasi pekerjaan yang tersisa sebesar 4,71%. Terhadap sisa pekerjaan tersebut, BPTJ mengajukan perpanjangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Maret 2023. Penyedia telah menyelesaikan fisik pekerjaan dengan presentasi sebesar 100% pada tanggal 13 Maret 2023 dan telah membayar denda keterlambatan senilai Rp136.619.768,00 pada tanggal 27 Maret 2023. Terhadap sisa nilai

kontrak tersebut akan ditindaklanjuti dengan pencatatan pada Aplikasi Sakti Modul Persediaan pada Periode Semester I Tahun Anggaran TA 2023.

*Tagihan TP/TGR Rp0,00*

#### C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*TPA*

*Rp0,00*

#### C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang Rp0,00*

#### C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Tanah*

*Rp152.859.956.635,00*

#### C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp152.859.956.635,00 dan Rp152.859.956.635,00. Tanah tersebut merupakan tanah pada 4 (empat) terminal tipe A di Wilayah Jabodetabek yang merupakan hibah dari pemerintah daerah/kota, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian saldo tanah per 31 Desember 2022*

| No.           | Luas       | Lokasi  | Nilai                  |
|---------------|------------|---|------------------------|
| 1             | 19.701 m2  | Terminal Poris Plawad - Kota Tangerang        | 21.326.665.771         |
| 2             | 21.415 m2  | Terminal Baranangsiang - Kota Eogor           | 57.356.548.458         |
| 3             | 103.721 m2 | Terminal Jatijajar - Kota Depok               | 66.768.167.406         |
| 4             | 25.995 m2  | Terminal Pondok Cabe - Kota Tangerang Selatan | 7.408.575.000          |
| <b>Jumlah</b> |            |   | <b>152.859.956.635</b> |

*Peralatan dan Mesin*

*Rp315.656.812.690,00*

#### C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp315.656.812.690,00 dan Rp270.591.771.847,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022*

|  |                        |
|--|------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2022                   | 270.591.771.847        |
| <b>Mutasi tambah:</b>                      | <b>54.243.134.056</b>  |
| Pembelian                                  | 3.647.497.743          |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP        | 30.343.328.600         |
| Reklasifikasi Masuk                        | 177.320.000            |
| Pengembangan Nilai Aset                    |                        |
| Pengembangan Melalui KDP                   | 10.850.694.500         |
| Hibah Masuk                                | 46.200.000             |
| Perolehan Lainnya                          | 9.178.093.213          |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                      | <b>(9.178.093.213)</b> |
| Penghentiaan Aset Dari Penggunaan          |                        |
| Transfer Keluar                            |                        |
| Reklasifikasi Keluar                       |                        |
| Koreksi Pencatatan                         | (9.178.093.213)        |
| Transaksi Normalisasi BMN                  |                        |
|  | -                      |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>          | <b>315.656.812.690</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | (194.795.795.423)      |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>     | <b>120.861.017.267</b> |

Transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp177.320.000,00 merupakan reklasifikasi barang berupa Guardrail yang semula merupakan kelompok barang Gedung dan Bangunan.

Transaksi Hibah masuk sebesar Rp46.200.000,00 merupakan perolehan hibah peralatan dan mesin. Hibah yang tercatat pada BPTJ merupakan hibah dari PT. Givaudan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor GIV-JAY-BAST-003-APR-2022 dan BA-BPTJ 4 Tahun 2022 tanggal perolehan 6 April 2022 berupa Rambu Jalan. Rincian hibah sesuai BAST adalah sebagai berikut:

| No.              | Deskripsi Barang                               | Qty | Satuan | Harga     | Total Harga       |
|------------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 1                | Rambu 75 Peringatan Penyeberangan Pejalan Kaki | 2   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 2                | Rambu 75 Larangan Berhenti                     | 2   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 3                | Rambu 75 Larangan Parkir                       | 1   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 4                | Rambu 75 Petunjuk Pejalan Kaki                 | 2   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 5                | Rambu 75 Larangan Putar Balik                  | 2   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 6                | Rambu 75 Tempat Pemberhentian Angkutan Umum    | 1   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 7                | Rambu 75 Peringatan Hati-Hati                  | 2   | Unit   | 3.850.000 | 3.850.000         |
| 8                | Marka Zebra Cross                              | 13  | M2     | 470.000   | 470.000           |
| 9                | Marka Pita Penggaduh                           | 6   | M2     | 470.000   | 470.000           |
| <b>Sub Total</b> |  |     |        |           | <b>55.130.000</b> |

Dari total Rp55.130.000,00 yang merupakan kategori aset tetap yaitu nomor urut 1 s.d. 7 dengan total Rp46.200.000,00.

Transaksi Perolehan Lainnya sebesar Rp9.178.093.213,00 merupakan perolehan aset yang dicatat sebagai KDP (pembayaran termin) dan

didefinisikan dengan aset lebih dari satu NUP, karena tidak dapat didefinisikan dengan metode Penyelesaian Pembangunan dengan KDP maka sesuai arahan KPPN menggunakan metode Transaksi koreksi kuantitas berkurang lalu dicatat lagi sebagai perolehan lainnya. Transaksi ini menyebabkan terbentuknya akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) pada LO dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 391116 pada LPE, untuk mengeliminasi akun sementara tersebut dilakukan penjurnalan secara manual.

### C.15 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan  
Rp203.296.389.836,00*

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp203.296.389.836,00 dan Rp 189.506.674.143,00.

#### *Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2022</b>                | <b>189.506.674.143</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                          | <b>14.478.844.000</b>  |
| Pembelian                                      | -                      |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP            | 2.776.918.000          |
| Reklasifikasi Masuk                            |                        |
| Pengembangan Nilai Aset                        |                        |
| Pengembangan Melalui KDP                       | 11.701.926.000         |
| Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi      |                        |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                          | <b>(689.128.307)</b>   |
| Penghapusan (Penghentian Aset Dari Penggunaan) |                        |
| Transfer Keluar                                |                        |
| Reklasifikasi Keluar                           | (177.320.000)          |
| Koreksi Pencatatan                             | (511.808.307)          |
| Transaksi Normalisasi BMN                      |                        |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>              | <b>203.296.389.836</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022     | (22.375.844.859)       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>         | <b>180.920.544.977</b> |

Transaksi Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp11.701.926.000,00 merupakan kegiatan lanjutan pembangunan terminal Tipe A Pondok Cabe dan Jatijajar.

Transaksi reklasifikasi keluar sebesar Rp177.320.000,00 merupakan reklasifikasi barang berupa Guardrail yang semula merupakan kelompok barang Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi kelompok Peralatan dan Mesin.

Transaksi Koreksi pencatatan sebesar Rp511.808.307,00 merupakan pengembalian belanja sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2021.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
*Rp27.437.061.023,00*

### C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.437.061.023,00 dan Rp27.437.061.023,00.

#### *Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2022</b>            | <b>27.437.061.023</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                      | <b>-</b>              |
| Pembelian                                  |                       |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP        |                       |
| Reklasifikasi Masuk                        |                       |
| Pengembangan Nilai Aset                    |                       |
| Pengembangan Melalui KDP                   |                       |
| Transfer Masuk                             |                       |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                      | <b>-</b>              |
| Penghentiaan Aset Dari Penggunaan          |                       |
| Transfer Keluar                            |                       |
| Reklasifikasi Keluar                       |                       |
| Koreksi Pencatatan                         |                       |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>          | <b>27.437.061.023</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | (16.913.151.822)      |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>     | <b>10.523.909.201</b> |

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp47.148.750,00*

### C.17 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp47.148.750,00 dan Rp47.148.750,00. Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian (lukisan lainnya).

Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada mutasi tambah atau mutasi kurang Aset Tetap Lainnya.

*Konstruksi Dalam*  
*Pengerjaan Rp0,00*

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan peralatan dan mesin dalam pengerjaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pada 31 Desember 2022 semua transaksi KDP telah direklasifikasi menjadi barang jadi (definitif).

*Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2022</b>            | -                       |
| <b>Mutasi tambah:</b>                      | <b>42.298.339.813</b>   |
| Perolehan/Penambahan KDP                   | 42.298.339.813          |
| Pengembangan KDP                           |                         |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                      | <b>(42.298.339.813)</b> |
| Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi      | (42.298.339.813)        |
| Pengembangan Melalui KDP                   |                         |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>          | -                       |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | -                       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>     | -                       |

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
*Rp(234.084.792.104,00)*

### C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(234.084.792.104,00) dan Rp(177.803.568.606,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

| No | Jenis Aset Tetap            | Nilai Perolehan           | Akm. Penyusutan             | Nilai Buku                |
|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin         | Rp 315.656.812.690        | Rp (194.795.795.423)        | Rp 510.452.608.113        |
| 2  | Gedung dan Bangunan         | Rp 203.296.389.836        | Rp (22.375.844.859)         | Rp 225.672.234.695        |
| 3  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 27.437.061.023         | Rp (16.913.151.822)         | Rp 44.350.212.845         |
| 4  | Aset Tetap Lainnya          | Rp 47.148.750             | Rp -                        | Rp 47.148.750             |
|    | <b>Total</b>                | <b>Rp 546.437.412.299</b> | <b>Rp (234.084.792.104)</b> | <b>Rp 780.522.204.403</b> |

*Aset Tak Berwujud*  
*Rp143.037.406.000,00*

### C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp143.037.406.000,00 dan Rp137.884.362.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa Software.

*Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Mutasi tambah:</b>                          | <b>5.586.107.500</b>   |
| Pembelian                                      |                        |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP            | 5.586.107.500          |
| Reklasifikasi Masuk                            |                        |
| Pengembangan Nilai Aset                        |                        |
| Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya  |                        |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                          | <b>(433.064.000)</b>   |
| Penghapusan (Penghentian Aset Dari Penggunaan) |                        |
| Transfer Keluar                                |                        |
| Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya  | (222.750.000)          |
| Koreksi Pencatatan                             | (210.314.000)          |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>              | <b>143.037.406.000</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022     | (5.530.797.323)        |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>         | <b>137.506.608.677</b> |

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp(222.750.000) merupakan penghentian Aset Tak Berwujud berupa Software yaitu OS Microsoft Windows dan Antivirus dengan perolehan awal melalui Transfer Masuk dari Biro Umum Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 dengan total 60 NUP, senilai Rp222.750.000,00 (Microsoft Windows 50 NUP @Rp3.630.000,00 dan Antivirus 10 NUP @Rp4.125.000,00) yang sudah kadaluarsa masa manfaatnya.

Koreksi pencatatan senilai Rp(210.314.000,00) merupakan pengembalian belanja sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2021.

*Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0,00*

### **C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2022</b>            | -                      |
| <b>Mutasi tambah:</b>                      | <b>5.586.107.500</b>   |
| Perolehan/Penambahan ATBDP                 | 5.586.107.500          |
| Pengembangan ATBDP                         |                        |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                      | <b>(5.586.107.500)</b> |
| Reklasifikasi ATBDP Menjadi Barang Jadi    | (5.586.107.500)        |
|  |                        |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>          | -                      |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | -                      |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>     | -                      |

*Aset Lain-lain*  
*Rp350.053.000,00*

### C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp350.053.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022*

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2022</b>                | <b>213.103.000</b>  |
| <b>Mutasi tambah:</b>                          | <b>222.750.000</b>  |
| Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya  | 222.750.000         |
|  |                     |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                          | <b>(85.800.000)</b> |
| Penghapusan (Penghentian Aset Dari Penggunaan) | (85.800.000)        |
|  |                     |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>              | <b>350.053.000</b>  |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022     | (335.630.764)       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>         | <b>685.683.764</b>  |

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp(222.750.000) merupakan penghentian Aset Tak Berwujud berupa Software yaitu OS Microsoft Windows dan Antivirus dengan perolehan awal melalui Transfer Masuk dari Biro Umum Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 dengan total 60 NUP senilai Rp222.750.000,00 (Microsoft Windows 50 NUP @Rp3.630.000,00 dan Antivirus 10 NUP @Rp4.125.000,00) yang sudah kadaluarsa masa manfaatnya.

Mutasi kurang aset lain-lain senilai Rp85.800.000,00 merupakan Aset Tak Berwujud yang dihapuskan berupa software yang sudah tidak digunakan dalam operasional.

*Rincian Aset Lain-lain yang dihapuskan per 31 Desember 2022*

| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | KUANTITAS | RPH SATUAN   | TOTAL               | Keterangan   |
|--|-----------|--------------|---------------------|--|
| Sudah Tidak Bermanfaat                                       |           |              |                     |  |
| Aset Tak Berwujud  | 1         | Rp38.500.000 | Rp38.500.000        | Software Komputer - Aplikasi Survey Pejalan        |
| Aset Tak Berwujud  | 1         | Rp47.300.000 | Rp47.300.000        | Sistem Informasi Jaringan Transportasi Jabodetabek |
| <b>JUMLAH</b>  |           |              | <b>Rp85.800.000</b> |  |

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp350.053.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional dikarenakan rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022*

| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | KUANTITAS | RPH SATUAN  | TOTAL                | Keterangan                |
|--|-----------|-------------|----------------------|---------------------------|
| Sudah tidak bermanfaat                                       |           |             |                      |                           |
| Peralatan dan Mesin  | 12        | Rp7.018.000 | Rp84.216.000         | Baggage Trolley           |
| Peralatan dan Mesin  | 1         | Rp3.267.000 | Rp3.267.000          | Kursi Besi/Metal          |
| Peralatan dan Mesin  | 8         | Rp1.116.500 | Rp8.932.000          | Alat Rumah Tangga Lainnya |
| Peralatan dan Mesin  | 9         | Rp1.177.000 | Rp10.593.000         | Veld Bed (Alat Keamanan)  |
| Peralatan dan Mesin  | 3         | Rp6.765.000 | Rp20.295.000         | Fan                       |
| Kadaluarsa   |           |             |                      |                           |
| Software   | 50        | Rp3.630.000 | Rp181.500.000        | Microsoft Windows         |
| Software   | 10        | Rp4.125.000 | Rp41.250.000         | Antivirus                 |
| <b>JUMLAH</b>  |           |             | <b>Rp350.053.000</b> |                           |

Atas peralatan dan mesin yang rusak berat senilai total Rp127.303.000,00 akan diajukan penghapusan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPKNL Jakarta I untuk proses lelang penghapusan dan atas software yang kadaluarsa senilai total Rp222.750.000,00 akan segera dilakukan penghapusan dengan pembetulan tim penghapusan internal terlebih dahulu.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
Rp(5.249.817.522,00)*

### C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp(5.249.817.522,00) dan Rp(4.566.114.038,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan

dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya*

| No                          | Jenis Aset Lainnya   | Nilai Perolehan           | Akm. Penyusutan/<br>Amortisasi | Nilai Buku                |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1                           | Aset Tak Berwujud  | Rp 143,037,406,000        | Rp (5,530,797,323)             | Rp 148,568,203,323        |
| 2                           | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | Rp 350,053,000            | Rp (335,630,764)               | Rp 685,683,764            |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b> |  | <b>Rp 143,387,459,000</b> | <b>Rp (5,866,428,087)</b>      | <b>Rp 149,253,887,087</b> |

*Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00*

#### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

| Keterangan                         | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Uang Persediaan (UP)         | -                | -                |
| Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan | -                | -                |
|                                    | -                | -                |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp0,00*

#### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp41.029.000,00*

#### C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp41.029.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka tersebut merupakan sewa BMN berupa kios di Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad dan Jatijajar dari PT Narendra pembayaran ke Kas Negara tanggal 21 Desember 2022 untuk sewa mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-149/MK.6/KNL.0701/2022 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan tanggal 11 Agustus 2022.

*Hibah Langsung yang Belum Disahkan Rp0,00* **C.26 Hibah Langsung yang Belum Disahkan**

Nilai Hibah Langsung yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah langsung yang belum disahkan merupakan hibah yang telah dicatat dengan dasar dokumen BAST namun belum terbit Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL).

*Ekuitas Rp0,00*

**C.27 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp619.982.538.473,00 dan Rp599.695.945.509,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp3.462.000.550,00*

#### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.462.000.550,00 dan Rp2.373.146.000,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,71%. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN   | 2022                 | 2021                 | Naik (turun)       | %           |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan        | 445,500              | 544,500              | (99,000)           | (18.18)     |
| Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya               | 3,461,000,000        | 3,305,700,000        | 155,300,000        | 4.70        |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | -                    | -                    | -                  | -           |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                      | 555,050              | -                    | 555,050            | -           |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>3,462,000,550</b> | <b>3,306,244,500</b> | <b>155,756,050</b> | <b>4.71</b> |

*Beban Pegawai  
Rp27.105.528.514,00*

#### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.105.528.514,00 dan Rp23.122.286.036,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2022 meningkat sebesar 17,23% dibandingkan dengan Tahun 2021. Peningkatan belanja pegawai dimaksud diakibatkan bertambahnya pegawai BPTJ sebanyak 45 orang baik berasal dari pengadaan CPNS, PKN STAN dan pola pembibitan STTD, selain itu terdapat penataan birokrasi yang berdampak pada dialihkannya jabatan pengawas menjadi fungsional ahli dan berimplikasi pada kewajiban pemberian tunjangan fungsional yang secara nilai rupiah tunjangan fungsional lebih besar dari tunjangan struktural eselon IV.

Rincian Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN                                     | 2022                  | 2021                  | NAIK (TURUN)         | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Beban Gaji Pokok PNS                       | 9,339,349,507         | 7,860,645,766         | 1,478,703,741        | 18.81        |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 168,053               | 135,130               | 32,923               | 24.36        |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS                | 555,583,262           | 520,332,378           | 35,250,884           | 6.77         |
| Beban Tunj. Anak PNS                       | 154,215,454           | 146,148,774           | 8,066,680            | 5.52         |
| Beban Tunj. Struktural PNS                 | 513,540,000           | 679,380,000           | (165,840,000)        | (24.41)      |
| Beban Tunj. Fungsional PNS                 | 273,513,000           | 43,550,000            | 229,963,000          | 528.04       |
| Beban Tunj. PPh PNS                        | 34,884,823            | 34,190,311            | 694,512              | 2.03         |
| Beban Tunj. Beras PNS                      | 520,989,480           | 474,857,940           | 46,131,540           | 9.71         |
| Beban Uang Makan PNS                       | 1,360,479,000         | 1,222,859,000         | 137,620,000          | 11.25        |
| Beban Tunjangan Umum PNS                   | 442,835,000           | 355,500,000           | 87,335,000           | 24.57        |
| Beban Uang Lembur                          | 115,630,000           | 403,475,000           | (287,845,000)        | (71.34)      |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 13,794,340,935        | 11,381,211,737        | 2,413,129,198        | 21.20        |
|  |                       | -                     | -                    | -            |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>27,105,528,514</b> | <b>23,122,286,036</b> | <b>3,983,242,478</b> | <b>17.23</b> |

*Beban Persediaan  
Rp3.656.266.222,00*

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.656.266.222,00 dan Rp3.100.220.626,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,61% dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN        | 2022                 | 2021                 | NAIK (TURUN)       | %            |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 3,656,266,222        | 2,986,312,546        | 669,953,676        | 22.43        |
| Beban persediaan lainnya  | -                    | 113,908,080          | -                  | -            |
| <b>Jumlah</b>             | <b>3,656,266,222</b> | <b>3,100,220,626</b> | <b>669,953,676</b> | <b>21.61</b> |

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp107.404.562.080  
,00*

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp107.404.562.080,00 dan Rp88.593.420.903,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,23% dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan meningkatnya beberapa beban yang signifikan seperti beban Barang Non Operasional Lainnya dikarenakan beban pengadaan marka yang pada tahun ini dianggarkan pada akun 52 (belanja barang), Beban Jasa Konsultan dikarenakan adanya beberapa studi yang memerlukan jasa konsultan, dan Beban Sewa dikarenakan adanya keperluan sewa berupa sewa gedung untuk gudang, sewa mobil listrik dan sewa parkir untuk kendaraan dinas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN   | 2022                   | 2021                  | NAIK (TURUN)          | %            |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Beban Keperluan Perkantoran  | 17.742.272.125         | 16.258.867.058        | 1.483.405.067         | 9,12         |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh                                    | 778.230.673            | 827.924.100           | (49.693.427)          | (6,00)       |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja                               | 628.390.000            | 571.350.000           | 57.040.000            | 9,98         |
| Beban Barang Operasional Lainnya                                   |                        | 1.001.290.500         | (1.001.290.500)       | (100,00)     |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19             |                        | 816.600.000           | (816.600.000)         | (100,00)     |
| Beban Bahan  | 6.025.446.611          | 2.010.680.680         | 4.014.765.931         | 199,67       |
| Beban Honor Output Kegiatan  | 71.400.000             | 371.200.000           | (299.800.000)         | (80,77)      |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                               | 56.644.693.680         | 55.516.219.975        | 1.128.473.705         | 2,03         |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1.239.297.379          | 2.917.721.436         | (1.678.424.057)       | (57,53)      |
| Beban Langganan Listrik  | 2.742.689.748          | 2.487.982.284         | 254.707.464           | 10,24        |
| Beban Langganan Telepon  |                        | 10.316.646            | (10.316.646)          | (100,00)     |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya                              | 423.805.459            | 816.793.670           | (392.988.211)         | (48,11)      |
| Beban Jasa Konsultan   | 12.560.149.736         | 1.757.860.500         | 10.802.289.236        | 614,51       |
| Beban Sewa   | 4.502.458.701          | 1.663.929.554         | 2.838.529.147         | 170,59       |
| Beban Jasa Profesi   | 927.197.218            | 1.425.983.300         | (498.786.082)         | (34,98)      |
| Beban Jasa Lainnya   | 2.726.716.000          | -                     | 2.726.716.000         | -            |
| Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19                   | 345.777.500            | 82.500.000            | 263.277.500           | 319,12       |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin                      | 46.037.250             | 56.201.200            | (10.163.950)          | (18,08)      |
|  | -                      | -                     | -                     | -            |
| <b>Jumlah</b>  | <b>107.404.562.080</b> | <b>88.593.420.903</b> | <b>18.811.141.177</b> | <b>21,23</b> |

*Beban Pemeliharaan  
Rp8.336.707.133,00*

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.336.707.133,00 dan Rp19.064.384.459,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 56,27% dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahunan TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| URAIAN JENIS BEBAN                        | 2022                 | 2021                  | NAIK (TURUN)            | %              |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan    | 2.127.448.307        | 11.846.503.588        | (9.719.055.281)         | (82,04)        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin    | 5.235.651.010        | 6.903.824.454         | (1.668.173.444)         | (24,16)        |
| Beban Pemeliharaan Jaringan               | -                    | -                     | -                       | -              |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 6.232.190            | 463.100               | 5.769.090               | 1.245,75       |
| Beban Persediaan suku cadang              | 967.375.626          | 313.593.317           | 653.782.309             | 208,48         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>8.336.707.133</b> | <b>19.064.384.459</b> | <b>(10.727.677.326)</b> | <b>(56,27)</b> |

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp18.926.560.302,00*

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.926.560.302,00 dan Rp20.507.724.143,00.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,71% dikarenakan adanya efisiensi perjalanan dinas melalui kebijakan *automatic adjustment* dan tidak dilakukan pembukaan blokir *automatic adjustment* sampai dengan akhir Desember 2022. Rincian beban perjalanan dinas untuk Tahunan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                              | 2022                  | 2021                  | NAIK (TURUN)           | %             |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 11.062.136.010        | 9.883.446.354         | 1.178.689.656          | 11,93         |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 111.960.000           | 82.433.971            | 29.526.029             | 35,82         |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.227.621.895         | 1.660.633.071         | (433.011.176)          | (26,08)       |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 6.359.477.653         | 8.881.210.747         | (2.521.733.094)        | (28,39)       |
| Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri            | 165.364.744           | -                     | 165.364.744            | -             |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>18.926.560.302</b> | <b>20.507.724.143</b> | <b>(1.581.163.841)</b> | <b>(7,71)</b> |

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
Rp0,00*

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan Sosial Rp0,00*

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp57.663.741.907,00*

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp57.663.741.907,00 dan Rp54.644.497.234,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN   | 2022                  | 2021                  | NAIK (TURUN)         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 50.431.228.544        | 47.652.623.491        | 2.778.605.053        |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   | 3.982.103.676         | 3.428.487.198         | 553.616.478          |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan  | 1.873.743.472         | 1.873.743.473         | (1)                  |
| Beban Penyusutan Jaringan  | 4.989.666             | 4.989.666             | -                    |
| Beban Amortisasi Software  | 1.364.934.380         | 1.645.466.734         | (280.532.354)        |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah     | -                     | 9.625.000             | (9.625.000)          |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 6.742.169             | 29.561.672            | (22.819.503)         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>57.663.741.907</b> | <b>54.644.497.234</b> | <b>3.019.244.673</b> |

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00*

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN           | 2022     | 2021     | NAIK (TURUN) | %        |
|------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang PNB | -        | -        | -            | -        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |

*Beban Lain-Lain  
Rp0,00*

#### D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Surplus/(defisit)  
Pelepasan Aset  
Non Lancar  
(Rp14.437.500,00)*

#### D.12 SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing senilai Rp(14.437.500,00) dan Rp0,00.

*Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN            | 2022              | 2021     | NAIK (TURUN)        | %        |
|-------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| Beban Kerugian Pelepasan Aset | 14.437.500        | -        | (14.437.500)        | -        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>14.437.500</b> | <b>-</b> | <b>(14.437.500)</b> | <b>-</b> |

Peningkatan beban kerugian pelepasan aset non lancar berasal dari penghapusan hasil kajian dan software yang sudah tidak digunakan dalam operasional senilai Rp85.800.000,00 dikurangi Akumulasi Amortisasi software yang tidak digunakan dalam operasional senilai Rp71.362.500,00 sehingga nilai bukunya senilai Rp14.437.500,00 menjadi beban kerugian pelepasan aset.

*Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp3.531.509.676,00*

#### D.13 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah

masing-masing sebesar Rp3.531.509.676,00 dan Rp1.203.067.270,00.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Tahunan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN  | 2022                 | 2021                 | NAIK (TURUN)         | %             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 24.524.669           | 2.408.808            | 22.115.861           | 918,12        |
| Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu    | 2.814.716.701        | 523.077.162          | 2.291.639.539        | 438,11        |
| Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu     | 722.122.306          | 632.581.300          | 89.541.006           | 14,15         |
| Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu | -                    | 45.000.000           |                      |               |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan                     | -                    | -                    | -                    | -             |
| Pendapatan Perolehan Aset Lainnya                           | -                    | -                    | -                    | -             |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan                          | (29.854.000)         | -                    | (29.854.000)         | -             |
| Beban Persediaan Rusak/Usang                                | -                    | -                    | -                    | -             |
| <b>Jumlah</b>   | <b>3.531.509.676</b> | <b>1.203.067.270</b> | <b>2.373.442.406</b> | <b>197,28</b> |

*Pos-Pos Luar Biasa  
Rp0,00*

#### D.14 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

*Defisit LO  
Rp(216.114.293.432,00)*

#### D.15 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(216.114.293.432,00) dan Rp(221.274.661.831,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

*Ekuitas Awal  
Rp599.695.945.509  
,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp599.695.945.509,00 dan Rp534.164.854.395,00.

*Defisit LO  
Rp(216.114.293.432,00)*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(216.114.293.432,00) dan Rp(221.274.661.831,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00*

### E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00*

### E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(2.310.000,00).

*Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non Revaluasi  
Rp(500.966.447,00)*

### E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(500.966.447,00) dan Rp(550.031.110,00). Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada tahun 2022 merupakan pengembalian belanja sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2021.

*Koreksi Nilai Aset  
Lainnya Non  
Revaluasi  
Rp(210.314.000,00)*

## E.6 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(210.314.000,00) dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada tahun 2022 merupakan pengembalian belanja sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2021.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp244.083.955.069  
,00*

## E.7 Transaksi antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp244.083.955.069,00 dan Rp287.358.094.055,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

| Transaksi Antar Entitas                | Nilai                  | Keterangan                                     |
|--|------------------------|--|
| Ditagihkan ke Entitas Lain             | 244.083.955.069        | Realiasi Belanja Pegawai, Barang dan Modal     |
| Diterima dari Entitas Lain             | - 7.064.393.226        | Realiasi PNB                                   |
| Transfer Keluar                        | -                      |  |
| Transfer Masuk                         | 37.475.000             | Transfer Masuk Blanko Tilang dari Dirjen Darat |
| Pengesahan Hibah Langsung              | 55.130.000             |  |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung |                        |  |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>237.112.166.843</b> |  |

*Kenaikan/  
Penurunan Ekuitas  
Rp20.286.592.964,  
00*

## E.8 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.286.592.964,00 dan Rp65.531.091.114,00.

*Ekuitas Akhir  
Rp619.982.538.473  
,00*

## E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp619.982.538.473,00 dan Rp599.695.945.509,00.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan surat Ketua Sub Tim Jakarta 1 BPK-RI tanggal 12 April 2022 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan tanggapan Kepala BPTJ atas temuan pemeriksaan disampaikan bahwa pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2022 yang terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan pada konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI nomor 3 dan 4, terdapat kelebihan pembayaran pada 10 (sepuluh) pekerjaan belanja barang dan belanja modal Tahun 2022 total senilai Rp483.524.259,35.

Terkait kelebihan pembayaran dimaksud, BPTJ telah berkoordinasi dengan penyedia pekerjaan dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pelaksana                    | Kegiatan   | Nilai Kelebihan Bayar (Rp) | Tanggal Setor |
|----|------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| 1. | PT Trimitra Sarana Perkasa   | Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Raya Bogor (Gandaria Bts. DKI Jakarta - Kedunghalang Bts. Bogor) (No. Ruas 072 073) | 6.253.086,67               | 2 Mei 2023    |
| 2. | PT Yokatta Digdaya Indonesia | Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Bts. Depok-Bogor (No. Ruas 012 010)   | 4.908.102,20               | 2 Mei 2023    |
| 3. | CV Diantama Traffindo        | Pengadaan dan Pemasangan Marka Perlengkapan Jalan Raya Serang (Bts. Kota Serang - Bts. Kota Tangerang) (No. Ruas 003)            | 4.542.800,00               | 2 Mei 2023    |
| 4. |                              | Pengadaan dan Pemasangan Marka di  | 4.795.680,00               | 2 Mei 2023    |

|                                |                              |   |                |               |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|---------------|
|                                |                              | Ruas Jalan Nasional Wilayah Kota Tangerang (Nomor Ruas 003 004),  |                |               |
| 5.                             | CV Sabihis Putera Utama Jaya | Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Transyogi (Nomor Ruas 097), Jalan Letda Natsir (No Ruas 097), Jalan Raya Cimanggis | 4.159.947,53   | 2 Mei 2023    |
| 6.                             | CV Sugema Kreasi Utama       | Pengadaan Lanjutan Alat Counting Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek  | 22.223.000,00  | 2 Mei 2023    |
| 7.                             | CV Gita Kencana              | Pemeliharaan ATCS di Wilayah Jabodetabek  | 17.600.000,00  | 2 Mei 2023    |
| 8.                             | PT Trimuda Tunggal Sejahtera | Pembangunan Fasilitas Integrasi ( <i>Skybridge</i> ) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede                                | 29.257.908,00  | 2 Mei 2023    |
| 9.                             | PT Bahana Suprindo Kreasi    | Pembangunan Reaktivasi Stasiun dan Fasilitas Integrasi Lintas Citayam - Nambo   | 29.732.860,00  | 2 Mei 2023    |
| 10.                            | PT Kodjari Tata Angkutan     | Penyediaan Layanan Angkutan Umum dengan Skema <i>Buy The Service</i> (BTS) Tahun 2022   | 360.050.875,15 | 19 April 2022 |
| Total Penyetoran Ke Kas Negara |                              |   | 483.524.259,35 |               |

Terhadap kelebihan pembayaran dimaksud, akan dilakukan koreksi nilai aset pada Semester 1 Tahun 2023 pada pekerjaan belanja modal yaitu Pembangunan Reaktivasi Stasiun dan Fasilitas Integrasi Lintas Citayam - Nambo senilai Rp29.732.860,00 dan belanja barang persediaan diserahkan ke Pemda yaitu Pembangunan Fasilitas Integrasi (*Skybridge*) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede senilai Rp29.257.908,00.

## F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

### F. 2. 1. Sertifikasi Tanah

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menerima hibah aset dari Pemerintah Daerah Kota di wilayah Jabodetabek melalui penandatanganan berita acara serah terima personil, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D). Hibah P3D tersebut berasal dari empat terminal Tipe A di Jabodetabek yaitu Terminal Baranangsiang Kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan dan Jatijajar Kota Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pemda Kota (Bupati/Walikota) masing-masing daerah dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub. Atas hibah tersebut BPTJ telah mencatat sebagai BMN ke dalam Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan persetujuan register hibah dari Kanwil Perbendaharaan Wilayah DKI Jakarta dan Memo Persetujuan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta IV serta menginput aset dalam bentuk tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP.

Adapun posisi sertifikasi tanah terminal sebagai berikut:

1. Lahan terminal Poris Plawad seluas 1,9 hektar, pada tahun 2022 telah masuk dalam program percepatan sertifikasi nasional (Pronas) Kanwil DJKN Banten sehingga pada tahun 2022 posisi lahan/tanah telah bersertifikat. Lahan terminal Poris Plawad bersertifikat Hak Pakai No. 00014, penerbitan sertifikat di Tangerang tanggal 12 Mei 2020;
2. Lahan terminal Baranangsiang seluas 2,1 hektar, posisi sertifikat masih atas nama Pemerintah Kota Bogor dan telah dikerjasamakan dalam bentuk BGS (Bangun Guna Serah) oleh Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI sampai dengan tahun 2042. Posisi saat ini PT PGI sedang melakukan konsolidasi internal terkait akuisisi perusahaan dan pada prinsipnya PT PGI berkomitmen untuk melanjutkan BGS. Sertifikat belum dapat dilakukan proses balik nama karena status tanah adalah HGB diatas HPL dengan PT PGI, dan akan dilakukan balik nama

menjadi a.n. Pemerintah RI s.q. Kementerian Perhubungan setelah addendum perjanjian BGS ditandatangani.

3. Lahan Terminal Pondok Cabe posisi saat ini telah diikutsertakan melalui program Sertifikasi Mandiri dan saat ini sedang proses validasi dan penghapusan hak (untuk 9 sertifikat alas hak dijadikan 1 sertifikat atas nama pemerintah RI c.q Kemenhub). Berdasarkan BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe Nomor 551.22/158/BPKAD/2018 dan BA.46 Tahun 2018, luasan Tanah Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe sebesar 25.995 m<sup>2</sup> dan sesuai pasal 4 dalam hal terjadinya perbedaan luas tanah antara surat pelepasan hak/dokumen penguasaan dan/atau pemilikan atas tanah dengan dengan hasil ukur Kantor Pertanahan, maka perhitungan luas yang digunakan adalah perhitungan hasil ukur Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil pengukuran peta bidang oleh BPN Kota Tangerang Selatan, terdapat perbedaan luasan Tanah Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe dari 25.995 m<sup>2</sup> menjadi 23.690 m<sup>2</sup> dan atas pengukuran luasan oleh BPN tersebut, telah dilakukan tindak lanjut perubahan kuantitas luasan tanah terminal pada Sakti Modul Aset.
4. Lahan Terminal Jatijajar berdasarkan hasil pembahasan dengan BPN Kota Depok, sertifikat tanah Terminal Jatijajar dipecah menjadi lima peta bidang, sehingga dilakukan perubahan KIB dari semula satu KIB menjadi lima KIB yang dicatat menjadi Reklasifikasi Masuk pada TA 2022. Dari kelima peta bidang tersebut, empat peta bidang telah dilakukan balik nama Pemerintah RI cq. Kementerian Perhubungan dan satu bidang telah diikutsertakan dalam program sertifikasi nasional tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Pakai No. 00013 tanggal 23 September 2022 Terminal Jatijajar NUP 5 seluas 37,810 m<sup>2</sup> Senilai Rp24.339.393.490,00
  - 2) Sertifikat Hak Pakai No. 00011 tanggal 22 Juli 2022 Terminal Jatijajar NUP 6 seluas 2,985 m<sup>2</sup> Senilai Rp1.921.531.065,00
  - 3) Sertifikat Hak Pakai No. 00014 tanggal 23 September 2022 Terminal Jatijajar NUP 7 seluas 44,577 m<sup>2</sup> Senilai Rp28.695.507.633,00

- 4) Sertifikat Hak Pakai No. 00012 tanggal 22 Juli 2022 Terminal Jatijajar NUP 8 seluas 671 m<sup>2</sup> Senilai Rp431.942.159,00
- 5) Tanah Terminal Jatijajar NUP 9 seluas 17,678 m<sup>2</sup> Senilai Rp11.379.793.059,00 telah diikutsertakan dalam program sertifikasi nasional tahun anggaran 2023.

| Nama Barang                   | NUP | Luas (m <sup>2</sup> ) | Jenis/No. Sertifikat | Status Sertifikat                           |
|-------------------------------|-----|------------------------|----------------------|---|
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 5   | 37,810                 | Hak Pakai No. 13     | Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub |
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 6   | 2,985                  | Hak Pakai No. 11     | Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub |
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 7   | 44,577                 | Hak Pakai No. 14     | Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub |
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 8   | 671                    | Hak Pakai No. 12     | Bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kemenhub |
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 9   | 17,678                 | -                    | Proses Sertifikasi di BPN Kota Depok        |

### F. 2. 2. Anggaran PC-PEN

Anggaran PC-PEN terdiri dari anggaran Penanganan Covid-19 senilai Rp2.502.373.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.502.187.105,00 (99,99 persen) dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp20.058.861.000,00 dengan realisasi senilai Rp10.143.817.644,00 (50,57 persen).

Realisasi PEN padat karya hanya terealisasi 50,57 persen dikarenakan kegiatan Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten dan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Bekasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kegiatan dimaksud terdampak blokir *Automatic Adjustment* dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak mendapatkan ijin prinsip dari Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembukaan blokir.

# LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I PRINT OUT LAPORAN KEUANGAN DARI APLIKASI SAKTI
- LAMPIRAN II LAPORAN BMN
- LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI PC-PEN DAN PN
- LAMPIRAN IV MATRIKS TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA 2017-2021
- LAMPIRAN V DAFTAR SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA ATAS TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA 2017-2021

